

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah berjalan dengan baik, akan tetapi belum diimplementasikan sepenuhnya dalam hal ini proses pengelolaan modul kas dan modul pembukuan masih ada beberapa item yang belum dilakukan karena kesenjangan yang sering terjadi antara lain, pengelolaannya belum dijalankan secara maksimal, baik dari segi infrastruktur, keterlambatan pemrosesan data serta dari segi Sumber Daya Manusia.
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah: (1) Sumber Daya Manusia yang belum memadai; (2) kurangnya pelatihan/bimbingan teknik dalam penerapan aplikasi SIPKD sehingga Pemahaman Admin terhadap keuangan daerah belum di implementasikan sepenuhnya dalam aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; (3) Minimnya sosialisasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke pimpinan-pimpinan daerah dan ke SKPD-SKPD.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka saran yang diberikan penulis adalah :

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan Pelatihan atau Bimbingan Teknisi kepada Pegawai dalam penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sehingga kedepannya diharapkan Pemahaman Staf/Pegawai dalam pengelolaan keuangan daerah bisa lebih mandiri tanpa bergantung pada bantuan dari pihak luar.
2. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan sosialisasi lebih jauh lagi tentang Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) kepada pimpinan-pimpinan daerah dan kepada Pegawai SKPD sehingga kedepannya diharapkan aplikasi ini bisa terimplementasikan sepenuhnya guna memperlancar proses pengelolaan keuangan daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, 1990 *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE
- Halim, Abdul. 1994 *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: YBPFE
- Halim, Abdul. 2000 *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2004 *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mursyidi. 2009 *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Jakarta.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- _____. Surat Edaran Mendagri Nomor 900/122/BAKD tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan dan Implementasi SIPKD dan Regional SIKD.
- _____. Surat Edaran Mendagri Nomor 900.806. BAKD, SE.900.360. BAKD tentang Implementasi SIPKD.
- Sugiyono, 2013. **Metode Penelitian Manajemen**. CV alfabeta, Bandung.
- Sutabri, Tata. 2004 *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi
- Sutabri, Tata 2005 *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

_____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta.

Widjajanto, Nugroho, 2001, *Sistem Informasi Akuntansi*, Erlangga, Jakarta.

[http://syopian.net/blog/sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.html](http://syopian.net/blog/sistem_informasi_pengelolaan_keuangan_daerah.html), diakses pada tanggal 27 Maret 2017)

<http://www.depdagri.go.id/pages/sipkd/sistem-informasi-pengelolaan-keuangan-daerah-sipkd>